

EFEKTIVITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Saukani¹, Siti Raudah², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: saukani139@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan banyaknya musibah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai, Tidak tercapainya target dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pertama, tahapan dalam sudah efektif, yang mana sudah disalurkan sesuai dengan SOP. Kedua, sasaran sudah efektif, yang mana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan. Ketiga, target belum efektif yang mana banyaknya musibah sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai. Keempat, komunikasi sudah efektif yang mana dilakukan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kepada Desa yang mengalami musibah. Kelima, penyediaan barang dan jasa belum efektif dimana tidak tercapainya target dalam penyaluran. Keenam, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sudah efektif yang mana pemberian bantuan sudah dilaksanakan. Ketujuh, sumberdaya manusia/petugas kurang efektif yang mana kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah petugas pemenuhan CPP, tidak tercapainya target dan banyaknya masyarakat yang terdampak musibah. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya penentuan jenis pangan pokok, mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan, adanya koordinasi yang dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disarankan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan strategi pengelolaan pangan serta peningkatan ketahanan pangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The problem of the many disasters in Hulu Sungai Utara Regency so that the distribution of aid is not achieved, the target in the distribution of Government Food Reserves (CPP) has not been achieved and the lack of employees in the implementation of fulfilling food needs. This research method is qualitative descriptive with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of this study are First, the stages in have been effective, which have been distributed according to the SOP. Second, the target has been effective, which is the Distribution of Government Food Reserves (CPP) is to reduce the burden of expenditure of Food Assistance Recipients. Third, the target has not been effective, which is the number of disasters so that the distribution of aid has not been achieved. Fourth, communication has been effective which is carried out in collaboration with the Civil Service Police Unit and the Hulu Sungai Utara Regency Fire Department as well as to the Villages that have experienced disasters. Fifth, the provision of goods and services has not been effective where the target in distribution has not been achieved. Sixth, the suitability to the needs of the community has been effective where the provision of aid has been carried out. Seventh, human resources/officers are ineffective which is the lack of employees in its implementation. The inhibiting factors are the lack of CPP fulfillment officers, the failure to achieve targets and the large number of people affected by the disaster. While the supporting factors are the determination of the type of staple food, reducing the burden of expenditure on aid recipients, the coordination that is carried out and in accordance with the needs of the community. It is recommended to the Head of the Food Security Service of Hulu Sungai Utara Regency to carry out food management strategies and increase food security so that several strategies.

Keywords: Effectiveness, Implementation of Government Reserves, Hulu Sungai Utara Regency

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana dinyatakan dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan. Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia, dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia berupa pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Makanan tidak hanya membuat semua makhluk hidup dapat melanjutkan usianya, tetapi juga membuat manusia bisa mengembangkan daya pikir dan spiritnya, juga mengatakan bahwa pemenuhan pangan atau yang disebutnya sebagai kecukupan pangan, menentukan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan suatu bangsa. Kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan manusia yang mandiri dan berkualitas tercermin dalam mutu dan keseimbangan pangan yang tersedia.

Apabila suatu keluarga atau masyarakat menyangdang masalah gizi, baik gizi kurang maupun lebih, maka keluarga dan masyarakat itu akan kehilangan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator peningkatan kualitas hidup bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pangan memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup bangsa, dan oleh karena itu diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang merata.

Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup merupakan aspek penting untuk membentuk ketahanan pangan yang baik. Peran Pemerintah sebagai pelayan publik dalam mewujudkan ketahanan pangan, memiliki tanggung jawab untuk membangun ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri dengan membuat undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pada pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Salah satu program pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan adalah mengembangkan ketersediaan pangan pada setiap saat. Mengembangkan ketersediaan pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan 4 cadangan pangan. Cadangan Pangan Nasional menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Jika pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi

Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan ketahanan pangan, adapun serangkaian masalah yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

1. Banyaknya musibah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai, dimana dalam 1 tahun terakhir pada Tahun 2023 penyediaan cadangan pangan pemerintah hanya 14% sampai 18% sedangkan bencana yang di alami melebihi penyediaannya hal ini terlihat dari penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah di Tahun 2023 untuk korban pasca bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Tidak tercapainya target dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga realisasi pada Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pangan tidak tercapai pada tiap tahunnya, dimana permasalahan dalam penyaluran tersebut harus memuat SOP, sedangkan SOP memerlukan waktu yang cukup lama sehingga yang seharusnya targetnya menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tidak terealisasikan.
3. Kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan yang mana kurangnya jumlah pegawai yang menangani dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak mempunyai transportasi tersendiri untuk mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

METODE

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl. Empu Mandistana, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2014:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2014:225) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut informan, orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi maka sumber data disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2014:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Richard M. Steers (2012:34) ukuran efektivitas	1. Pencapaian Tujuan	a. Tahapan b. Sasaran c. Target
	2. Integrasi	a. Komunikasi b. Penyediaan Barang dan Jasa
	3. Adaptasi	a. Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat b. Sumber Daya Manusia/Petugas

Sumber : Dibuat Peneliti, 2024

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:217) sebagai berikut :

1. Wawancara
Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.
2. Observasi (Pengamatan)
Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Efektivitas Retribusi Sewa Toko Pasar Paringin Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).
2. Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi.
3. Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. alat-alat bantu rekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

PEMBAHASAN

Ketahanan pangan juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan. Namun, tidak semua daerah mencapai target ketahanan pangan selama implementasi. Ketahanan pangan juga bersifat multidimensi.

Upaya evaluasi kepemimpinan organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Cara berpikir seperti ini menjadi salah satu kriteria untuk memutuskan apakah akan melakukan perubahan besar terhadap bentuk atau manajemen suatu organisasi. Dalam hal ini efektivitas adalah tercapainya tujuan organisasi melalui pendayagunaan sumber daya yang ada baik dari segi input, proses, dan output.

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Indikator tahapan dalam sudah efektif, yang mana penyelenggaraan CPP sudah disalurkan sesuai dengan SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran pelaku UKM yang mana untuk meningkatnya pendapatan dan pengembangan guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkembang serta berkeadilan sehingga meningkatkan kegiatan pembangunan daerah.

Indikator sasaran sudah efektif, yang mana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat..

Target adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu dengan batas yang ditentukan dan mencapai sebuah tujuan yang ditentukan. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran).

Indikator target belum efektif yang mana banyaknya musibah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai, dimana dalam 1 tahun terakhir pada Tahun 2023 penyediaan cadangan pangan pemerintah hanya 14% sampai 18%..

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi, begitu pula dalam jalannya pelaksanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Komunikasi atau talimarga adalah "suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain". Komunikasi dapat berbentuk verbal dan nonverbal.

Indikator koordinasi sudah efektif yang mana komunikasi yang dilakukan dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kepda Desa yang mengalami musibah.

Pengadaan adalah proses mengadakan/menyediakan melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan baik berupa kebutuhan masyarakat yang terdampak dengan kerawanan pangan yang ada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator penyediaan barang dan jasa belum efektif dimana tidak tercapainya target dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga realisasi pada Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pangan tidak tercapai pada tiap tahunnya, dimana permasalahan dalam penyaluran tersebut harus memuat SOP, sedangkan SOP memerlukan waktu yang cukup lama.

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, begitu pula dalam jalannya pelaksanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita.

Indikator kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sudah efektif yang mana penyelenggaraan CPP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana dalam pemberian bantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dimana bantuan berupa beras jagung dan kedelai yang mana mayoritas pada Kabupaten hulu Sungai Utara adalah beras untuk pangan sehingga dalam kebutuhan masyarakat sudah memenuhi dalam bantuan tersebut..

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya.

Indikator sumberdaya manusia/petugas kurang efektif yang mana kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan yang mana kurangnya jumlah pegawai yang menangani dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak mempunyai transportasi tersendiri untuk mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan yang mana kurangnya jumlah pegawai yang menangani dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak mempunyai transportasi tersendiri untuk mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). tidak tercapainya target dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga realisasi pada Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pangan tidak tercapai

pada tiap tahunnya, dimana permasalahan dalam penyaluran tersebut harus memuat SOP, sedangkan SOP memerlukan waktu yang cukup lama.

Banyaknya musibah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai, dimana dalam 1 tahun terakhir pada Tahun 2023 penyediaan cadangan pangan pemerintah hanya 14% sampai 18%. Sedangkan faktor pendukung adalah penyelenggaraan CPP tahap pertama dilakukan untuk jenis pangan pokok tertentu meliputi beras, jagung dan kedelai. Dana penyelenggaraan CPP tahap pertama dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat.

Adanya koordinasi dilakukan dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kepda Desa yang mengalami musibah. penyelenggaraan CPP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana dalam pemberian bantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dimana bantuan berupa beras yang mana mayoritas pada Kabupaten hulu Sungai Utara adalah beras untuk pangan sehingga dalam kebutuhan masyarakat sudah memenuhi dalam bantuan tersebut.

SIMPULAN

Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, tahapan dalam sudah efektif, yang mana penyelenggaraan CPP sudah disalurkan sesuai dengan SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kepada masyarakat. *Kedua*, sasaran sudah efektif, yang mana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat. *Ketiga*, target belum efektif yang mana banyaknya musibah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam penyaluran bantuan tidak tercapai, dimana dalam 1 tahun terakhir pada Tahun 2023 penyediaan cadangan pangan pemerintah hanya 14% sampai 18%. *Keempat*, komunikasi sudah efektif yang mana komunikasi yang dilakukan dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kepda Desa yang mengalami musibah. *Kelima*, penyediaan barang dan jasa belum efektif dimana tidak tercapainya target dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga realisasi pada Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pangan tidak tercapai pada tiap tahunnya. *Keenam*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sudah efektif yang mana penyelenggaraan CPP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana dalam pemberian bantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dimana bantuan berupa beras jagung dan kedelai. *Ketujuh*, sumberdaya manusia/petugas kurang efektif yang mana kurangnya jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan jumlah pegawai yang menangani dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak mempunyai transportasi tersendiri untuk mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah petugas pemenuhan CPP, tidak tercapainya target dan banyaknya masyarakat yang terdampak musibah. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya penentuan jenis pangan pokok, mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan, adanya koordinasi yang dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan strategi pengelolaan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan sehingga masih di butuhkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan pangan serta pemerintah bekerjasama dengan praktisi bidangnya untuk melakukan pengamatan guna mengatasi kekurangan pangan agar mampu meningkatkan ketahanan pangan terutama solusi untuk daerah rawan pangan.

Kepada Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan peran kelembagaan sosial ekonomi disetiap program bimtek, sosialisasi desa/kelurahan untuk pengembangan ketersediaan pangan melalui desa mandiri pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa untuk mewujudkan keytahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Steers, M Richard. 2014. *Efektivitas Organisasi Perusahaan (Cetakan ke 4)*. Jakarta: Erlangga.

Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung* : Alfabeta Bandung

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan

Harbani, Pasolong. 2018. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

Kumorotomo. 2015. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara..

Sunyoto. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru.

Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller. 2016. *Manajemen Pemasaran edisi 12 Jilid 1 & 2*. Jakarta: PT. Indeks..

Aria dan Atik. 2018. *Tata Kelola Administrasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Di PT.BAM Kabupaten Tegal*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Meda (Juripol). Vol.1 Nomor Februari 2018, p-ISSN:2599-1779. e-ISSN:2599-1787.

Gaspersz, Vincent, 2017. *“Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas”*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gronroos, C. 2016. *Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach*. Chishester: Jhon Wiley and Sond, Ltd.

Mulyawan, Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.

Pasolong 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.



Tjiptono Fandy. 2014. *Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.